

# Monthly Report

**Badan Pengarah Papua Provinsi  
Papua Barat**

**Maret 2025**

---

**Sekretariat Badan Pengarah Papua**



## APBN Regional Papua Barat

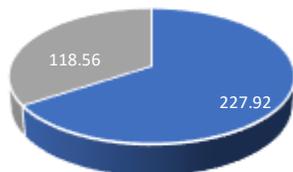
**Pendapatan Negara**  
Rp 346,48 miliar

**Belanja Negara**  
Rp 3.666,43 miliar

**Defisit Anggaran**  
(Rp 3.319,95 miliar)

- ❖ **Pajak Dalam Negeri** didominasi oleh PPH Nonmigas (PBB) dan PPN
- ❖ **PNBP tumbuh sebesar 1,17 persen (yoy)** didorong oleh peningkatan pada sumber pendapatan BLU dan PNBP Lainnya
- ❖ **Belanja K/L** didominasi Belanja pegawai.
- ❖ **Transfer Ke Daerah** didominasi oleh DAU *Block Grant* untuk belanja ASN Pemda

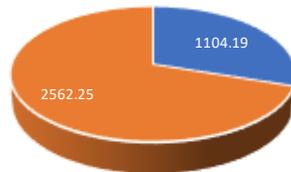
### Pendapatan Negara



■ Pajak DN ■ PNBP

Pajak DN	227,92
Pajak LN	-
PNBP	118,56

### Belanja Negara



■ Belanja K/L ■ TKD

Belanja K/L	1.104,19
Transfer Ke Daerah (TKD)	2.562,25

dalam miliar rupiah  
Sumber: OMSPAN (diolah)

## Permasalahan dan Rekomendasi

### Permasalahan/Kendala

Puskesmas Pembantu Masabui tidak berfungsi. Puskesmas lainnya di Oransbari dan Ransiki masih fokus pelayanan dalam Gedung, belum memper kuat upaya promotif, preventif, penemuan dan pengobatan dini.

Diperkirakan sebanyak 4.200 guru honorer di Papua Barat, pada berbagai jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), akan di rumah-kan oleh PEMDA. Dampak, kebijakan efisiensi belanja daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana Otsus jilid 1 pada Kab Teluk Wondama dirasa banyak yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tepat sehingga kesejahteraan masy. belum tercapai.

Tuntutan pelunasan kompensasi atas hak ulayat Masyarakat Dusner yang belum dipenuhi PT Wijaya Sentosa. Masyarakat juga menuntut pemulihan kerusakan alam dan upaya reboisasi segera dilakukan oleh Perusahaan tersebut

### Rekomendasi

Bupati menginstruksikan Kadis Kesehatan Mansel untuk menfungsikan kembali Pustu Masabui dan untuk puskesmas lainnya di Oransbari dan Ransiki diharapkan meningkatkan pelayanan promotif dan preventif

Kebijakan efisiensi belanja daerah perlu ditinjau kembali, utamanya belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur karena berdampak sistemik, dan mengganggu capaian kinerja di tahun mendatang

Diharapkan Gubernur Prov. Papua Barat dan Pemda Kab. Teluk Wondama dapat duduk bersama dan membahas secara serius untuk menemukan konsep yang tepat guna kesejahteraan OAP melalui dana otsus.

BP3OKP Papua Barat akan mengundang Pemerintah Provinsi, PT Wijaya Sentosa dan masyarakat selaku pemilik hak ulayat guna duduk bersama menyelesaikan persoalan yang saat ini dihadapi



## Indikator Percepatan Pembangunan Papua Barat dalam RIPP 2024

### PAPUA CERDAS

INDIKATOR	Target (2024)	Capaian (2024)	Target (2041)
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,65	13,17	14,59 -16,61
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,00	7,86	9,36 -10,37

### PAPUA PRODUKTIF

INDIKATOR	Target (2024)	Capaian	Target
Tingkat Kemiskinan	19,03% *	21,09%	5,81% -2,82 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,24% - 4,95%	* 4,13%	4,11 % -1,73%
Realisasi Investasi PMDN	Rp2,12 T - 2,42 T *	Rp 8,074 T	Rp92,3 -Rp174,5 T

### PAPUA SEHAT

INDIKATOR	Target (2024)	Capaian	Target
Umur Harapan Hidup (UHH)	66,52 *	68,47	68,66 -68,67
Tingkat Prevalensi Stunting	14,00 *	13,97%	<10 %
Indeks Pembangunan Manusia	66,81 - 67,04 *	67,47	N/A

\* Angka Target 2024 adalah angka provinsi Induk  
Sumber Data: RIPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)



## Kegiatan Strategis

### PAPUA SEHAT



Peninjauan operasionalisasi Puskesmas Pembantu serta Puskesmas di Oransbari dan Ransiki

### PAPUA CERDAS



Diskusi Kebijakan Efisiensi Belanja Daerah & Dampaknya terhadap Pelayanan Dasar bersama Bupati Fakfak

### PAPUA PRODUKTIF



Diskusi tata Kelola Otsus dan konsep kesejahteraan OAP Bersama Bupati Teluk Wondama

### PAPUA POLHUKAM



Kunjungan dan diskusi ke PT. Wijaya Sentosa menindaklanjuti tuntutan masyarakat pemilik hak ulayat

## Indikator Pembangunan Papua Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH)

▲ **68,47**

BASELINE (2022): 66,46  
TARGET (2024): 66,52



Prevalensi Stunting

▲ **13,97%**

BASELINE (2022): 30,00  
TARGET (2024): 14,00



Eliminasi Malaria

**0 Kab/Kota**  
Tahun 2023

BASELINE (2022): N/A  
TARGET (2024): N/A



Indeks Pembangunan Manusia

▲ **67,47%**

BASELINE (2022): 65,89  
TARGET (2024): 66,81-67,04

Sumber Data: RIPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM, Diskominfo PB, Profil Kesehatan Indonesia 2023 (diolah)

## Kendala/Permasalahan

1. Puskesmas Pembantu Masabui tidak berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat. sementara Puskesmas lainnya di Oransbari dan Ransiki masih fokus pada layanan dalam gedung yang pasif, belum memperkuat upaya promotif, preventif, penemuan dan pengobatan dini, serta manajemen faktor risiko penyakit.
2. RSUD Elia Waran belum memiliki layanan dokter spesialis kebidanan, mata, THT, saraf, dan radiologi.
3. Masyarakat OAP mengalami kendala dengan layanan BPJS terutama untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).

## Rekomendasi

1. Bupati menginstruksikan Kadis Kesehatan Mansel untuk menfungsikan kembali Pustu Masabui dan peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk puskesmas lainnya di Oransbari dan Ransiki promotif dan preventif guna mencegah penyakit dan kematian dini.
2. Bupati menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Elia Waran untuk mendatangkan dokter spesialis yang dibutuhkan.
3. Bupati dapat membentuk UPTD untuk mengelola jaminan kesehatan masyarakat OAP, khususnya bagi penerima PBI.

## Kegiatan Strategis



Monitoring lapangan Fasyankes Puskesmas Pembantu Masabui, Puskesmas Oransbari dan Ransiki



Monitoring dan Evaluasi Kesehatan di Kab. RSUD Elia Waran Manokwari Selatan



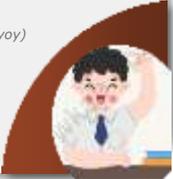
Rapat dan Koordinasi program kepesertaan JKN

## Capain Kinerja Indikator Pembangunan Papua Cerdas

### Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**  
Naik 0,01 tahun (yoy)

Baseline (2023): 13,16



### Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**  
Naik 0,20 tahun (yoy)

Baseline (2023): 7,66



#### Catatan:

Terjadinya kenaikan kinerja capaian Indikator, dikarenakan:

- **Meningkatnya kesadaran warga** tentang pentingnya peran pendidikan untuk masa depan generasi yang akan datang, dan
- **Pemerintah Daerah responsif** untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang Pendidikan di setiap daerah.

Sumber Data: RIPP dan BPS, 2025

## Dokumentasi Lapangan



Sinkronisasi & Harmonisasi RIPP dan Perencanaan Daerah bersama BAPPEDALITBANG Fakfak



Diskusi Kebijakan Efisiensi Belanja Daerah & Dampak thd Pelayanan Dasar bersama Bupati Fakfak



Bersama Kadis Pendidikan Kab. Fakfak, Membahas Dampak Kebijakan Efisiensi Belanja Daerah, terhadap Guru Honorer (SD, SMP, dan SMA)



Sinkronisasi & Harmonisasi RIPP dan RAPP bersama dengan Bappeda Prov Pa-Bar



Penandatanganan MoU BP3OKP Papua Barat dengan UNIPA

## PERMASALAHAN

1. Belum ada instrumen untuk memastikan bahwa, Perencanaan Pembangunan Daerah baik jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun), dan pendek (tahunan) di Papua Barat (Provinsi dan Kabupaten), telah menggunakan RIPP sebagai rujukan utama;
2. Di perkirakan sebanyak 4.200 guru honorer di Papua Barat, pada berbagai jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), akan di rumah-kan oleh PEMDA. Dampak, kebijakan efisiensi belanja daerah;
3. Angka putus sekolah di Papua Barat relatif tinggi antar jenjang pendidikan, yang ditunjukkan oleh data Angka Partisipasi Murni/APM Tahun 2024 (SD=94,52%, SMP=74,70%, SLTA=65,92%)

## REKOMENDASI

1. Perlu dikembangkan instrumen/tools untuk memastikan proses perencanaan pembangunan daerah di Papua Barat, telah sinkron dan harmonis dengan RIPP dan RAPP;
2. Kebijakan efisiensi belanja daerah, jika memungkinkan perlu ditinjau kembali, utamanya belanja untuk urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur). Mengingat dampaknya yang sistemik, dan berpotensi mengganggu capaian kinerja di tahun yang akan datang; dan
3. Pemerintah Provinsi Papua Barat, perlu melakukan revitalisasi tata kelola pendidikan dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah.

## Indikator Pembangunan Papua Produktif

### Tingkat Kemiskinan

▼ **21,66 %**

Turun 0,57% terhadap Maret '24

Baseline (2022): 21,33  
Target (2024): 19,03



### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

▼ **4,13 %**

Turun 0,05% (yoy)

Baseline (2022): 5,37  
Target (2024): 4,24-4,95



### Realisasi Investasi (PMA & PMDN)

▲ **Rp 8.074,1**

miliar

Baseline (2021): Rp919,07 M  
Target (2024): Rp92,3 - Rp174,5T



Sumber Data: RIPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)

## Kendala/Permasalahan

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana Otsus jilid 1 pada Kabupaten Teluk Wondama dirasa banyak yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tepat sehingga kesejahteraan masyarakat belum sampai kepada kata kemakmuran.
2. Sangat dikhawatirkan jika musrembang yang akan dilaksanakan nanti mengingat efisiensi anggaran maka kemungkinan program program daerah tidak akan berjalan
3. Perhatian Pemerintah Daerah Ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Teluk Bintuni Sangat kurang serta Pengalokasian dana APBD hanya terfokus kepada OPD tertentu.
4. Pemekaran DOB Kabupaten Muskona sudah di usulkan sebagai salah satu kabupaten definitif di provinsi Papua barat namun sampai saat belum terealisasi.

## Rekomendasi

1. Diharapkan Gubernur Prov. Papua Barat dan Pemda Kab. Teluk Wondama dapat duduk bersama dan membahas secara serius untuk menemukan konsep yang tepat guna kesejahteraan OAP melalui dana otsus.
2. Efisiensi anggaran telah diputuskan oleh Presiden melalui Inpres No 1 2025. Selanjutnya Kemenkeu & Kemendagri menindaklanjuti dengan Keputusan dan SE mengenai besaran efisiensi dan langkah2 menghadapi efisiensi belanja. Pemda agar dapat merespon hal itu agar program & kegiatan yang berkaitan dengan prioritas dan pelayanan publik dapat tetap terakomodir..
3. Perlu Ada kerjasama Pemerintah Daerah dan Dinas Perikanan dan Kelautan kab. Wondama untuk menjalankan fungsi RIPP dengan baik serta Pemkab Teluk Bintuni harus bijak dalam pengalokasian anggaran APBD untuk sektor unggulan.
4. Tujuan dari pemekaran adalah mendekatkan pelayan kepada masyarakat serta Dengan cara pemekaran DOB Kabupaten Muskona maka akan mengurangi daerah daerah konflik tetapi juga menghilangkan **Zona Merah**

## Kegiatan Strategis



BP3OKP Papua Barat melakukan Fungsi SHEK bersama Bupati Kabupaten Teluk Wondama



BP3OKP Provinsi Papua Barat melakukan fungsi SHEK bersama Setda, Dinas Dinas terkait Kabupaten Teluk Wondama



Kunjungan Kerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Ke Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni



Penyerahan Naskah Kajian DOB Muskona Oleh Tim DOB Kabupaten Muskona Kepada BP3OKP Provinsi Papua Barat

## Indikator Pembangunan Papua Polhukam/Papua Damai

Sumber Data: RIPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)

Indeks Kemanan  
Papua Barat

▼ 6,57 %



Kapasitas Lembaga  
Keamanan Papua Barat

▼ 5,69%



## Kendala/Permasalahan

- Masih adanya trauma yang dirasakan korban, keluarga korban dan masyarakat atas tragedi Wasior, oleh karenanya perlu peran Pemerintah untuk hadir dan memberi solusi
- Masyarakat Wasior menghendaki adanya peringatan 1 abad peradaban orang asli Papua oleh Pemerintah sebagai wujud syukur atas kemajuan yang dimulakan di Wasior
- Tuntutan pelunasan kompensasi atas hak ulayat Masyarakat Dusner yang belum dipenuhi seiring telah beroperasinya Perusahaan Kayu PT Wijaya Sentosa. Masyarakat juga menuntut agar kerusakan alam segera dipulihkan dan upaya reboisasi segera dilakukan oleh Perusahaan tersebut
- Tim Penambahan Kursi DPRPB Otsus sangat keberatan terhadap hasil seleksi dan penetapan kursi DPRPB Otsus 2025 sebab dinilai tidak melalui aturan dan mekanisme. BP3OKP diminta segera berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar melakukan peninjauan Kembali atas hasil penetapan kursi.
- Persiapan pemekaran DOB Moskona mengingat wilayah tersebut merupakan daerah zona merah

## Rekomendasi

- Perlu didorong percepatan Pendidikan gratis bagi korban tragedi Wasior berdarah seperti beasiswa dari TK Perguruan Tinggi serta bantuan rumah layak huni
- BP3OKP Papua Barat segera menindaklanjuti permintaan untuk dihadirkan Pemerintah (Presiden Republik Indonesia) di acara perayaan 1 abad Peradaban Orang Papua
- BP3OKP Papua Barat akan mengundang Pemerintah Provinsi, PT Wijaya Sentosa dan masyarakat selaku pemilik hak ulayat guna duduk bersama menyelesaikan persoalan yang saat ini dihadapi
- Guna menjaga stabilitas di Papua Barat, maka penambahan kursi DPRPB jalur Otsus segera ditambahkan
- Kajian kajian isu strategis terkait pemekaran DOB Kab Moskona segera dilakukan guna mempercepat pemekaran wilayah tersebut mulai kedudukan Ibu Kota DOB dan SDA yang ada di wilayah tersebut

## Kegiatan Strategis



Audiensi BP3OKP Bersama Bupati Terpilih Kabupaten Teluk Wondama Bpk. Elysa Auri



Kunjungan ke PT. Wijaya Sentosa menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan masyarakat pemilik hak ulayat



Rapat dan Diskusi bersama Tim Penambahan Kursi DPRP Otsus Papua Barat



Audiensi & Penyerahan Naskah kajian Tim Pemekaran DOB Kab Moskona Teluk Bintuni

**Terima Kasih**